

Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Raina Damarsari; Junaidi; Yulmardi

Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis peringkat kinerja pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi, dan (2) mengkategorikan kabupaten/kota di Provinsi Jambi berdasarkan kinerja pembangunan ekonomi, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari 2009-2012 dari Badan Pusat Statistik, terdiri dari delapan indikator untuk menilai kinerja pembangunan ekonomi, lima indikator untuk menilai kinerja pembangunan sumber daya manusia, dan delapan indikator untuk menilai kinerja pembangunan infrastruktur. Metode analisis untuk mencapai tujuan pertama adalah analisis komponen utama (PCA) dan analisis faktor serta untuk tujuan ketiga adalah analisis kluster. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kota Jambi menempati peringkat pertama dalam kinerja pembangunan secara keseluruhan, diikuti oleh dari Tanjab Barat dan Kabupaten Batang Hari, (2) Empat kelompok kabupaten/kota di Provinsi Jambi terbentuk berdasarkan kinerja pembangunan, yaitu: cluster I (Kerinci, Merangin, dan Tebo) memiliki kinerja yang pembangunan daerah paling rendah, klaster II (Tanjab Timur) memiliki kinerja pembangunan di atas rata-rata, klaster III (Sarolangun, Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjab Barat, Bungo Kabupaten, dan Kota Sungai Penuh) memiliki kinerja pembangunan rata-rata (menengah), dan kelompok IV (Kota Jambi) memiliki kinerja pembangunan paling tinggi.

Kata kunci : *Analisis Faktor, Analisis Klaster, Pembangunan Ekonomi, Sumberdaya Manusia, Infrastruktur.*

Abstract

This study aims (1) to analyze the performances among regencies/ cities in Jambi Province, and (2) to categorize the regencies/ cities in Jambi Province based on economic, human resources, and infrastructure development performances. Datas used in this study are secondary data of 2009-2012 from Statistics Indonesia, consists of eight component indicators to assess the performance of economic development, the five component indicators to assess the performance of the components of human resources development, and eight component indicators to assess the performance of infrastructure development. The analytical method used to achieve the objectives of the first research purposes is principal component analysis (PCA) which followed by factor analysis and to achieve the third purpose is cluster analysis. The results showed that (1) Jambi City is ranked first in the overall development performance, followed by of Tanjab Barat and Batang Hari Regencies, (2) four clusters of regencies/ cities in Jambi Province are formed based on the performance of development, namely: cluster I (Kerinci, Merangin, and Tebo Regencies) have lower performance of regional development, cluster II (Tanjab Timur Regency) has average to high performance of regional development, cluster III (Sarolangun, Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjab Barat, Bungo Regencies, and Sungai Penuh City) have average performance of regional development, and cluster IV (Jambi City) has high performance of regional development.

Keywords: *Factor Analysis, Cluster Analysis, Economic Development, Human Resources, Infrastructure.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dan sedang membangun, dituntut untuk melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan pembangunan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang tepat dan terarah.

Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang tertuang dalam UU nomor 22 dan 25 tahun 1999 telah mulai dilaksanakan mulai 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah ini merupakan babak baru dalam pembangunan dan pemerataan daerah. Terlepas dari belum siapnya pemerintah daerah, otonomi daerah diyakini merupakan cara terbaik untuk mendorong pembangunan daerah, dalam menggantikan sistem pembangunan terpusat yang dinilai kurang bisa mempercepat pembangunan dan memperbesar ketimpangan pembangunan masing-masing daerah.

Dalam memperkecil ketimpangan maka diperlukan indikator-indikator tambahan yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan daerah secara komprehensif, seperti

1. Kualitas sumber daya manusia (SDM), semakin tinggi kualitas SDM suatu daerah maka kecenderungan pendapatannya akan semakin tinggi pula. Kualitas SDM penduduk dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu kualitas pendidikan dan kesehatan.
2. Ketersediaan prasarana atau infrastruktur, kegiatan sosial ekonomi penduduk suatu wilayah mutlak ditunjang oleh ketersediaan akses transportasi, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Ditambahnya indikator tersebut merupakan upaya dalam melengkapi indikator yang selama ini digunakan (pertumbuhan ekonomi). Tercapainya tujuan pembangunan tidak hanya bergantung pada pembangunan ekonomi saja, tetapi juga harus didukung oleh Sumber

Daya Manusia yang berkualitas serta infrastruktur yang memadai untuk menjamin berjalannya proses pembangunan yang baik. Ketiga komponen saling berkaitan dan mempengaruhi. SDM dan infrastruktur merupakan penunjang bagi pembangunan ekonomi dan secara timbal balik, pembangunan ekonomi yang berjalan baik akan semakin mempercepat laju peningkatan kualitas infrastruktur dan kualitas SDM suatu wilayah.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa pengukuran kinerja pembangunan daerah tidak cukup hanya dilihat dari perkembangan ekonomi saja, namun perlu indikator yang mencerminkan ketiga komponen pembangunan daerah secara komprehensif, yaitu pembangunan ekonomi, Sumber Daya Manusia serta infrastruktur. Hal ini diperlukan karena capaian pembangunan ekonomi yang tinggi seringkali tidak disertai dengan capaian pembangunan SDM dan infrastruktur yang tinggi pula

Berdasarkan pada kondisi dan fenomena yang ada, maka penelitian ini bertujuan: (1) Menyusun model untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi ekonomi, sumber daya manusia, dan infrastruktur di tiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi. (2) Menganalisis perbandingan dan pemeringkatan kinerja pembangunan ekonomi, sumber daya manusia, dan infrastruktur antar kabupaten/ kota di Provinsi Jambi. (3) Mengkategorikan kabupaten/ kota di Provinsi Jambi menurut variabel kinerja pembangunan ekonomi, sumber daya manusia, dan infrastruktur; menguraikan karakteristik pada tiap kategori tersebut; serta menjelaskan implikasi kebijakan yang dapat diterapkan pada masing-masing kategori.

II. METODE PENELITIAN

Data yang Digunakan

Data yang digunakan adalah data sekunder runtun waktu (*time Series*) selama Tahun 2009 – 2012 yang

bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi. Data merupakan data tingkat kabupaten/kota yang terdiri dari 21 indikator yang dikelompokkan atas tiga kelompok data yaitu:

- a) *Kelompok indikator pembangunan ekonomi (8 indikator)*: laju pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, persentase sektor sekunder dan tersier terhadap PDRB, persentase PDRB kabupaten/kota terhadap provinsi, persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah, persentase rumah tangga yang memiliki pengeluaran perkapita tiap bulan kurang dari Rp 200.000,-, serta persentase penduduk miskin.
- b) *Kelompok indikator pembangunan Sumber Daya Manusia (5 indikator)*: jumlah penduduk, Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), rata-rata lama sekolah, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).
- c) *Kelompok indikator pembangunan infrastruktur (8 indikator)*: persentase jalan yang berstatus baik, rasio sekolah terhadap murid Sekolah Dasar per 1000 murid, persentase rumah tangga yang memiliki jaringan telepon, persentase desa berlistrik, rasio fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk (per 1000 penduduk), rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk (per 1000 penduduk), persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar (BAB) sendiri, dan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum kemasan/leding.

Metode Analisis Data

Untuk menjawab tujuan penelitian pertama yaitu menyusun model untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi, SDM, dan infrastruktur di tiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi digunakan metode analisis komponen utama dilanjutkan dengan analisis faktor. Penggunaan rangkaian analisis komponen utama

dan analisis faktor bertujuan untuk meringkas data yang terdiri dari 21 indikator menjadi set-set variabel baru yang jumlahnya lebih sedikit agar lebih mudah dipahami dan dianalisis namun tidak mengorbankan informasi.

Untuk menjawab tujuan kedua yaitu perbandingan dan pemeringkatan kinerja pembangunan ekonomi, SDM, dan infrastruktur di tiap kabupaten/ kota di Provinsi Jambi digunakan analisis deskriptif berdasarkan set variable-variabel baru yang terbentuk dari analisis sebelumnya. Penilaian posisi kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota secara relatif terhadap kinerja pembangunan daerah menurut tiga aspek capaian kinerja pembangunan daerah.

Untuk menjawab tujuan ketiga yaitu mengkategorikan kabupaten/ kota di Provinsi Jambi menurut indikator pembangunan ekonomi, SDM, dan infrastruktur serta menguraikan karakteristiknya digunakan analisis gerombol/*Cluster Analysis*. Analisis gerombol digunakan karena analisis ini dapat mengakomodasi pengelompokan observasi berdasarkan kesamaan karakteristik di antara observasi tersebut. Selanjutnya observasi tersebut diklasifikasikan ke dalam satu atau beberapa *cluster* (gerombol) sehingga objek-objek yang berada dalam satu gerombol akan mempunyai kemiripan satu dengan yang lain.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Berdasarkan analisis komponen utama dan analisis faktor didapatkan bahwa:

- a) Model pengukuran kinerja pembangunan ekonomi kabupaten/ kota di Provinsi Jambi tersusun dari lima indikator awal yang memenuhi syarat, yaitu: besarnya PDRB perkapita, persentase sektor tersier terhadap PDRB, persentase PDRB kabupaten/ kota terhadap provinsi,

persentase rumah tangga yang memiliki pengeluaran perkapita tiap bulan kurang dari Rp 200.000,-, serta persentase penduduk miskin di suatu kabupaten/kota. Kemudian, terbentuk dua faktor yang mewakili 74,878 persen keragaman dari kelima indikator awal tersebut.

- b) Model pengukuran kinerja pembangunan sumber daya manusia kabupaten/kota di Provinsi Jambi tersusun dari tiga indikator awal yang memenuhi syarat, yaitu: jumlah penduduk, Angka Melek Huruf (AMH), dan rata-rata lama sekolah. Kemudian, terbentuk satu faktor yang mewakili 67,349 persen keragaman dari ketiga indikator awal tersebut.
- c) Model pengukuran kinerja pembangunan infrastruktur kabupaten/ kota di Provinsi Jambi tersusun dari tujuh indikator awal yang memenuhi

syarat, yaitu: persentase jalan yang berstatus baik, rasio sekolah terhadap murid Sekolah Dasar per 1000 murid, persentase rumah tangga yang memiliki jaringan telepon, persentase desa berlistrik, rasio fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk (per 1000 penduduk), rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk (per 1000 penduduk), dan persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar (BAB) sendiri. Kemudian, terbentuk dua faktor yang mewakili 55,785 persen keragaman dari ketujuh indikator awal tersebut.

Selanjutnya, dari faktor-faktor tersebut diperoleh nilai skor faktor kinerja pembangunan ekonomi, sumberdaya manusia dan infrastruktur seperti diberikan pada Tabel 1:

Tabel.1. Nilai Skor Faktor Hasil Analisis Faktor Variabel Kinerja Pembangunan Ekonomi

| No | Kabupaten/Kota | Skor Kinerja | | |
|----|----------------|--------------|---------|---------------|
| | | Ekonomi | SDM | Infrastruktur |
| 1 | Kerinci | -0,5739 | 0,1504 | -1,4668 |
| 2 | Merangin | -0,5699 | 0,2349 | -0,3180 |
| 3 | Sarolangun | -0,0020 | -0,8485 | 0,0999 |
| 4 | Batang Hari | 0,3779 | 0,0628 | 0,4058 |
| 5 | Muaro Jambi | -0,7520 | 0,1348 | 0,7252 |
| 6 | Tanjab Timur | 1,2939 | -1,9036 | -0,0571 |
| 7 | Tanjab Barat | 0,0504 | 0,1980 | 0,0527 |
| 8 | Tebo | -0,7614 | -0,6327 | -0,6444 |
| 9 | Bungo | -0,2545 | 0,0640 | -0,1019 |
| 10 | Kota Jambi | 1,3703 | 2,3668 | 1,2892 |
| 11 | Sungai Penuh | -0,1789 | 0,1730 | 0,0153 |

Kinerja Pembangunan Ekonomi

Nilai rata-rata skor faktor untuk sebelas kabupaten/kota di Provinsi Jambi adalah nol. Hal ini berlaku untuk ketiga variabel kinerja pembangunan. Pada Tabel 1, kabupaten/kota yang skornya bernilai positif menandakan bahwa skor variabel kinerja pembangunan ekonominya berada di atas rata-rata,

begitu pula sebaliknya skor yang bernilai negatif menandakan bahwa skor variabel kinerja pembangunan ekonominya berada di bawah rata-rata.

Kota Jambi merupakan daerah yang memiliki skor kinerja pembangunan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 1,3703, yang disusul oleh Kabupaten Tanjab Timur dengan skor sebesar

1,2939. Jika dibandingkan dengan peringkat ketiga, yaitu Kabupaten Batanghari, selisih skor kinerja pembangunan ekonomi kedua wilayah tersebut dapat dikatakan sangat besar. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja pembangunan ekonomi di Kota Jambi dan Kabupaten Tanjab Timur relatif jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain di Provinsi Jambi.

Perekonomian Kota Jambi sangat menonjol dibanding kabupaten/ kota lain di Provinsi Jambi dikarenakan statusnya sebagai ibukota provinsi yang menjadikannya sebagai pusat kegiatan perekonomian. Kegiatan perekonomian di kota ini ditopang terutama oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran, di mana nilai tambah yang dihasilkan sektor tersebut hampir selalu lebih tinggi jika dibandingkan sektor lain seperti pertanian atau industri.

Di sisi lain, menonjolnya perekonomian di Kabupaten Tanjab Timur ditopang terutama oleh pertambangan minyak dan gas bumi. Pada tahun 2012, sebesar 61,74 persen nilai tambah yang dihasilkan di Kabupaten Tanjab Timur disumbang oleh subsektor pertambangan minyak dan gas bumi. Pertambangan minyak dan gas bumi dapat menghasilkan nilai tambah yang relatif besar dalam waktu singkat. Namun minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sehingga tidak dapat terus-menerus diandalkan sebagai penopang utama dalam perekonomian daerah.

Kondisi yang berlawanan terjadi di Kabupaten Tebo dan Muaro Jambi. Kedua kabupaten tersebut memiliki skor kinerja pembangunan ekonomi yang paling rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi, yaitu masing-masing sebesar -0,7614 dan -0,7520. Lebih dari separuh (50,68 persen) nilai tambah yang dihasilkan di Kabupaten Tebo pada 2012 berasal dari sektor pertanian.

Sektor pertanian sendiri termasuk ke dalam golongan sektor primer yang kemampuan menghasilkan nilai tambahnya berada di bawah golongan sektor sekunder dan tersier. Hal ini dapat diartikan, golongan sektor primer seperti sektor pertanian cenderung menghasilkan nilai tambah yang lebih kecil, bahkan jika kuantum produksi yang dihasilkan lebih besar daripada hasil produksi golongan sektor sekunder dan tersier. Pada konteks daya saing antar daerah, umumnya suatu daerah yang perekonomiannya berbasis pertanian yang minim ditunjang teknologi akan lebih rendah perekonomiannya jika dibandingkan daerah yang berbasis sektor sekunder maupun tersier.

Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Muaro Jambi, di mana nilai tambah perekonomiannya ditopang oleh golongan sektor primer, yaitu pertanian (32,20 persen) dan sektor pertambangan dan penggalian (21,87 persen). Di samping itu, fakta bahwa letak Kabupaten Muaro Jambi yang mengelilingi Kota Jambi juga menyebabkan hilangnya potensi nilai tambah di sektor perdagangan, sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa, karena sebagian penduduk Kabupaten Muaro Jambi membawa penghasilannya untuk dibelanjakan dan diinvestasikan di lembaga keuangan yang berada di Kota Jambi.

Kinerja Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pada Tabel 1, kabupaten/kota yang nilai skor faktor variabel kinerja pembangunan Sumber Daya Manusia berada di atas rata-rata (bernilai positif) adalah Kabupaten Kerinci, Merangin, Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjab Barat, Bungo, Kota Jambi dan Sungai Penuh. Kabupaten lainnya memiliki skor negatif, atau dapat dikatakan kinerja pembangunan Sumber Daya Manusia berada di bawah rata-rata.

Selanjutnya Kota Jambi memiliki skor kinerja pembangunan sumber daya manusia tertinggi yaitu sebesar 2,3668. Jika dibandingkan dengan peringkat kedua dan ketiga, yaitu Kabupaten Merangin dan Tanjab Barat, selisih skor kinerja pembangunan sumber daya manusianya dapat dikatakan sangat besar. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja pembangunan ekonomi di Kota Jambi relatif jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain di Provinsi Jambi. Penjelasan dari hal ini adalah jumlah penduduk Kota Jambi yang mencapai 17,19 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2012 memiliki potensi besar dalam hal ketersediaan tenaga kerja. Selain itu, lagi-lagi Kota Jambi diuntungkan dengan status sebagai ibukota provinsi yang menjadikannya memiliki fasilitas pendidikan yang relatif lebih baik dan lebih mudah diakses. Sehingga AMH serta rata-rata lama sekolah penduduk Kota Jambi jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten/ kota lain di Provinsi Jambi.

Kabupaten yang memiliki skor kinerja pembangunan sumber daya manusia yang paling rendah di Provinsi Jambi adalah Kabupaten Tanjab Timur yaitu -1,9036. Selisih antara kabupaten ini peringkat di atasnya yaitu Kabupaten Sarolangun terbilang sangat besar. Artinya, Kabupaten Tanjab Timur sangat tertinggal dalam hal kinerja pembangunan sumber daya manusia. Hal ini selaras dengan kondisi Kabupaten Tanjab Timur yang selalu memiliki AMH dan rata-rata lama sekolah terendah di Provinsi Jambi dalam periode 2009 sampai 2012.

Kinerja Pembangunan Infrastruktur

Berdasarkan Tabel 1, kabupaten/ kota yang nilai skor faktor variabel kinerja pembangunan infrastrukturnya berada di atas rata-rata (bernilai positif) adalah Kabupaten Sarolangun, Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjab Barat, Kota Jambi dan Sungai Penuh. Sisanya, yaitu

Kabupaten Kerinci, Merangin, Tanjab Timur, Tebo dan Bungo memiliki skor di bawah nol (negatif), atau dapat dikatakan kinerja pembangunan infrastrukturnya berada di bawah rata-rata.

Kota Jambi memiliki skor kinerja pembangunan infrastruktur tertinggi, yaitu sebesar 1,2892, disusul oleh Kabupaten Muaro Jambi dengan skor sebesar 0,7252. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja pembangunan ekonomi di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain di Provinsi Jambi. Status Kota Jambi sebagai ibukota provinsi, pusat perekonomian, dan pusat pemerintahan membuat Kota Jambi mendapat prioritas dalam hal pembangunan infrastruktur, yang meliputi ketersediaan jalan, jaringan telepon *fixed line*, listrik PLN, sekolah, fasilitas sanitasi, fasilitas dan tenaga kesehatan. Tidak mengherankan jika fasilitas-fasilitas tersebut baik jumlah dan kualitasnya lebih baik dibanding kabupaten/ kota lain di Provinsi Jambi. Letak Kabupaten Muaro Jambi yang berbatasan langsung dengan Kota Jambi menyebabkan kabupaten tersebut ikut mendapatkan keuntungan dari perluasan infrastruktur dari ibukota provinsi.

Kondisi yang sebaliknya terjadi di Kabupaten Kerinci, kabupaten ini memiliki skor kinerja pembangunan infrastruktur terendah di Provinsi Jambi, yaitu sebesar -1,4668. Selisih antara kabupaten ini peringkat di atasnya yaitu Kabupaten Tebo terbilang relatif besar. Artinya, Kabupaten Kerinci sangat tertinggal dalam hal kinerja pembangunan infrastruktur. Hal ini selaras dengan kondisi pada tahun 2012, persentase jalan yang berstatus baik, persentase desa berlistrik, rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk, dan persentase rumah tangga terdapat fasilitas BAB di Kabupaten Kerinci berada di bawah angka rata-rata Provinsi Jambi.

Pemeringkatan Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Secara keseluruhan, peringkat kinerja pembangunan ekonomi, SDM, dan infrastruktur kabupaten/ kota di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 2. Kota Jambi menempati peringkat pertama, diikuti dengan Kabupaten Tanjab Barat. Jika ditingkatkan, Kabupaten Tanjab Barat memiliki potensi untuk memiliki daya saing yang kuat karena memiliki potensi ekonomi yang relatif besar, SDM yang berkualitas, serta infrastruktur yang dapat menunjang kegiatan sosial ekonomi penduduk setempat.

Kabupaten Merangin dan Sarolangun sebenarnya memiliki peringkat yang sejajar, namun setelah dibandingkan dari akumulasi skor ketiga komponen kinerja pembangunan daerah terdapat selisih tipis sebesar 0,0976. Kabupaten

Merangin unggul pada peringkat kinerja pembangunan SDM jika dibandingkan Kabupaten Sarolangun.

Peringkat terbawah kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Tebo (peringkat 11) dan Kabupaten Kerinci (peringkat 10). Kondisi Kabupaten Tebo yang perekonomiannya paling tertinggal serta minim infrastruktur menyebabkan kualitas sumber daya manusianya pun menjadi tertinggal. Lain halnya dengan Kabupaten Kerinci, kualitas sumber daya manusianya sebenarnya berada sedikit di atas rata-rata Provinsi Jambi. Namun letaknya yang paling jauh dari ibukota provinsi dan kondisi geografisnya yang dikelilingi oleh Bukit Barisan menyebabkan pembangunan infrastrukturnya menjadi lebih tertinggal

Tabel 2. Peringkat Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Menurut Tiga Aspek Kinerja Pembangunan Daerah dan Peringkat Secara Keseluruhan

| No | Kabupaten/ Kota | Peringkat Kinerja Pembangunan | | | Total |
|----|-----------------|-------------------------------|-----|---------------|-------|
| | | Ekonomi | SDM | Infrastruktur | |
| 1 | Kerinci | 9 | 5 | 11 | 10 |
| 2 | Merangin | 8 | 2 | 9 | 6 |
| 3 | Sarolangun | 5 | 10 | 4 | 7 |
| 4 | Batang Hari | 3 | 8 | 3 | 3 |
| 5 | Muaro Jambi | 10 | 6 | 2 | 5 |
| 6 | Tanjab Timur | 2 | 11 | 7 | 8 |
| 7 | Tanjab Barat | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 8 | Tebo | 11 | 9 | 10 | 11 |
| 9 | Bungo | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | Kota Jambi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Sungai Penuh | 6 | 4 | 6 | 4 |

Pengkategorian Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Guna mempermudah perencanaan program-program pembangunan, mempermudah pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya, perlu dilakukan pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Jambi menjadi beberapa kategori yang memiliki karakteristik homogen. Pengelompokan atau pengkategorian kabupaten

/kota tersebut dapat didasarkan dari kinerja pembangunan ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur.

Berdasarkan metode *K-Means Cluster*, dimana jumlah gerombol ditentukan dari awal. Beberapa jumlah gerombol awal dipilih untuk menentukan berapa jumlah yang paling optimal. Setelah melihat karakteristik yang ada pada tiap gerombol maka dipilihlah

empat gerombol sebagai jumlah yang optimal. Terbentuknya empat gerombol tersebut dinilai paling baik, karena gerombol satu dengan lainnya (*between cluser*) tersebut memiliki karakteristik yang berbeda/heterogen, sedangkan

anggota dalam satu gerombol (*within cluster*) memiliki karakteristik yang serupa/ homogen, seperti yang terlihat pada Tabel 3:

Tabel 3. Karakteristik Kabupaten/ Kota yang Menjadi Anggota dalam Tiap Gerombol yang Terbentuk

| Gerombol | Karakteristik | Kabupaten/ Kota yang Menjadi Anggota Gerombol |
|---|--|---|
| Gerombol I (Kinerja Pembangunan Daerah Rendah) | - Ekonomi Rendah - SDM Sedang - Infrastruktur Rendah | a. Kab. Kerinci b. Kab. Merangin c. Kab. Tebo |
| Gerombol II (Kinerja Pembangunan Daerah Sedang Cenderung Tinggi) | - Ekonomi Tinggi - SDM Rendah - Infrastruktur Sedang | a. Kab. Tanjung Timur |
| Gerombol III (Kinerja Pembangunan Daerah Sedang) | - Ekonomi Sedang - SDM Sedang - Infrastruktur Sedang | a. Kab. Sarolangun b. Kab. Batanghari c. Kab. Muaro Jambi d. Kab. Tanjung Barat e. Kab. Bungo f. Kota Sungai Penuh |
| Gerombol IV (Kinerja Pembangunan Daerah Tinggi) | - Ekonomi Tinggi - SDM Tinggi - Infrastruktur Tinggi | a. Kota Jambi |

Pada Tabel 3 terlihat bahwa terdapat empat gerombol yang memiliki karakteristik yang berbeda. Gerombol I memiliki tiga anggota (Kabupaten Kerinci, Merangin, dan Tebo), gerombol II memiliki satu anggota (Kabupaten Tanjung Jabung Timur), gerombol III memiliki enam anggota (Kabupaten Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Bungo, dan Kota Sungai Penuh), dan gerombol IV memiliki satu anggota (Kota Jambi).

Gerombol I

Gerombol ini memiliki karakteristik kinerja pembangunan ekonomi yang rendah, kinerja pembangunan sumber daya manusia (SDM) sedang, dan kinerja pembangunan infrastruktur rendah. Anggota gerombol adalah Kabupaten Kerinci, Merangin, dan Tebo. Berdasarkan karakteristik tersebut, gerombol ini dinamakan gerombol dengan kinerja pembangunan daerah rendah.

Gerombol II

Gerombol ini memiliki karakteristik kinerja pembangunan ekonomi yang tinggi, kinerja pembangunan sumber daya manusia (SDM) rendah, dan kinerja pembangunan infrastruktur sedang. Anggota dari gerombol ini adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan karakteristik tersebut, gerombol ini dinamakan gerombol dengan kinerja pembangunan daerah sedang cenderung tinggi.

Gerombol III

Gerombol ini memiliki karakteristik kinerja pembangunan ekonomi yang sedang, kinerja pembangunan sumber daya manusia (SDM) sedang, dan kinerja pembangunan infrastruktur sedang. Anggota dari gerombol ini adalah Kabupaten Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Bungo, dan Kota Sungai Penuh. Berdasarkan karakteristik tersebut, gerombol ini dinamakan gerombol kinerja pembangunan daerah sedang.

Keenam anggota gerombol ini tersebar dari wilayah timur sampai barat Provinsi Jambi. Kabupaten/kota tersebut memiliki perbedaan dari segi perekonomian, SDM, maupun infrastruktur.

Gerombol IV

Gerombol ini memiliki karakteristik kinerja pembangunan ekonomi yang tinggi, kinerja pembangunan sumber daya manusia (SDM) tinggi, dan kinerja pembangunan infrastruktur tinggi. Anggota dari gerombol ini adalah Kota Jambi. Berdasarkan karakteristik tersebut, gerombol ini dinamakan gerombol dengan kinerja pembangunan daerah tinggi.

Wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi dan berada pada ketinggian rata-rata 10 sampai 60 meter di atas permukaan laut. Karakteristik perekonomian Kota Jambi didominasi oleh sektor tersier, kemudian diikuti oleh sektor sekunder. Kinerja pembangunan ekonomi, SDM, dan infrastrukturnya merupakan yang tertinggi di Provinsi Jambi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Model pengukuran kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi, yaitu:
 - a. Model pengukuran kinerja pembangunan ekonomi tersusun dari lima indikator awal: PDRB perkapita, persentase sektor tersier terhadap PDRB, persentase PDRB kabupaten/kota terhadap provinsi, persentase rumah tangga dengan pengeluaran perkapita perbulan kurang dari Rp 200.000,-, serta persentase penduduk miskin.
 - b. Model pengukuran kinerja pembangunan sumber daya manusia tersusun dari tiga indikator awal: jumlah penduduk, Angka Melek Huruf (AMH), dan rata-rata lama sekolah.

- c. Model pengukuran kinerja pembangunan infrastruktur tersusun dari tujuh indikator awal: persentase jalan berstatus baik, rasio sekolah terhadap murid Sekolah Dasar per 1000 murid, persentase rumah tangga yang memiliki jaringan telepon, persentase desa berlistrik, rasio fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk (per 1000 penduduk), rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk (per 1000 penduduk), dan persentase rumah tangga dengan fasilitas buang air besar sendiri.
2. Peringkat kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi berdasarkan variabel ekonomi, SDM, dan infrastruktur diurutkan dari tinggi ke rendah adalah: Kota Jambi, Kabupaten Tanjab Barat, Kabupaten Batanghari, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjab Barat, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Tebo.
 3. Terdapat empat kategori gerombol kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang memiliki karakteristik yang berbeda. Gerombol I terdiri dari Kabupaten Kerinci, Merangin, dan Tebo memiliki karakteristik kinerja pembangunan daerah rendah, gerombol II yang beranggotakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki karakteristik kinerja pembangunan daerah sedang cenderung tinggi, gerombol III terdiri dari Kabupaten Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Bungo, dan Kota Sungai Penuh memiliki karakteristik kinerja pembangunan daerah sedang, dan gerombol IV yang beranggotakan Kota Jambi memiliki karakteristik kinerja pembangunan daerah tinggi.

Saran

1. Pengambilan kebijakan pembangunan hendaknya disesuaikan dengan karakteristik capaian kinerja pembangunan masing-masing kabupaten kota, yaitu:
 - a. Untuk anggota gerombol I, mengoptimalkan anggaran untuk membangun fasilitas perhubungan untuk memudahkan pemasaran produksi sektor pertanian yang menjadi sektor utama dari ketiga kabupaten tersebut. Prioritas selanjutnya adalah menambah dan memperbaiki fasilitas kesehatan dan pendidikan, termasuk tenaga kesehatan dan pengajar.
 - b. Untuk anggota gerombol II, difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dari segi pendidikan agar penduduk setempat tidak hanya menjadi “penonton” dalam pembangunan ekonomi yang sudah dapat dibilang tinggi.
 - c. Untuk anggota gerombol III, pembangunan ekonomi, SDM, dan infrastruktur hendaknya dilakukan secara bersamaan, karena ketiga aspek tersebut belum maksimal capaiannya. Jika pembangunan ketiga aspek tersebut secara bersamaan tidak dapat dilakukan karena keterbatasan anggaran, maka prioritas pembangunan dilakukan untuk aspek yang paling rendah capaiannya sesuai skor dan peringkat masing-masing kabupaten/ kota anggota gerombol ini.
 - d. Untuk anggota gerombol IV, diprioritaskan pada menekan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial supaya tidak memicu kriminalitas serta meningkatkan pendapatan pemerintah daerah melalui optimalisasi pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
2. Bagi pemerintah provinsi, prioritas pembangunan dapat diarahkan kepada kabupaten/kota yang peringkat kinerja pembangunan daerahnya rendah terlebih dahulu, agar tercapai pemerataan pembangunan dengan tetap memperhatikan potensi masing-masing wilayah. Jika kesenjangan pembangunan antar kabupaten/ kota dapat ditekan pada level yang rendah, maka akan lebih mudah dalam perencanaan pembangunan provinsi secara keseluruhan.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memasukkan indikator-indikator pembangunan lain yang belum ada dalam penelitian ini. Semakin banyak indikator yang diteliti, diharapkan dapat menggambarkan kinerja pembangunan daerah yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P., Alisjahbana, A.S., Effendi, N., Budiono, 2002. *Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*, BPFE UGM, Yogyakarta, hal 5-94.
- Amaliyah, F., Wibawati, 2012, *Pengelompokan Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Berdasarkan Indikator Indonesia Sehat 2010*, *Jurnal Sains dan Seni ITS*, Vol. 1 No. 1, Edisi Sept. 2012, hal 188-193.
- Amir, A; Junaidi, ; Yulmardi,. 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*. IPB Press. Bogor
- Aryanto, R., 2011, *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan*, *Jurnal ILMIAH*, Vol. 3 No. 2, Edisi 2011, hal 1-13.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, UNDP Indonesia, 2010, *Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari*

- Indonesia, UNDP Indonesia, Jakarta, hal 5-27.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2005, *Indikator Statistik Bidang Sosial Menurut Jenis dan Penggunaannya*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2010, *Jambi Dalam Angka 2010*, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi.
- _____, 2010, *Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2009*, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi.
- _____, 2011, *Jambi Dalam Angka 2011*, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi.
- _____, 2011, *Statistik Daerah Provinsi Jambi 2011*, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi.
- _____, 2011, *Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2010*, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi.
- _____, 2012, *Jambi Dalam Angka 2012*, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi.
- _____, 2012, *Statistik Daerah Provinsi Jambi 2012*, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi.
- _____, 2012, *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Jambi 2010*, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi, hal 4-27.
- _____, 2012, *Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2011*, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi.
- _____, 2013, *Jambi Dalam Angka 2013*, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi.
- _____, 2013, *Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2012*, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi.
- _____, 2014, *PDRB Provinsi Jambi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013*, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi.
- _____, 2014, *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Jambi 2012*, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi, hal 7-30.
- Constantin, D.L., 1999, *Regional Competition in Romania: Determinants and Policies*, Paper Prepared for the 39th European Congress of the Regional Science Association, Dublin.
- DiStefano, C., Zhu, M., Mindrila, D., 2009, *Understanding and Using Factor Scores: Considerations for the Applied Researcher, Practical Assessment, Research and Evaluation*, Vol. 14 Nomor 20, Edisi Oktober 2009, hal 1-11.
- Gustiar, R., 2010, *Penggerombolan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Variabel Kinerja Pembangunan Daerah (Tesis S-2)*, UPT Perpustakaan Unimed, Medan.
- Juanda, B; Junaidi. 2012. *Ekonometrika Deret Waktu; Teori dan Aplikasi*. IPB Press. Bogor
- Mirza, D.S., 2012, *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009*, *Economics Developmental Analysis Journal Unnes*, Vol. 1 Nomor 1, Edisi November 2012, hal 1-15.
- Nurcholis, H., 2005, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*., Grasindo, Jakarta, hal 3-23.
- Prahasta, E., 2002, *Sistem Informasi Geografis: Tutorial ArcView*, Penerbit Informatika, Bandung.
- Ridhanie, A., 2012, *Kinerja Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia*, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, Vol. 1 Nomor 2, Edisi Juli-Desember 2012, hal 73-92.

- Rustiono, D., 2008, *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah* (Tesis S-2), Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Santosa, P.B., Rahayu, R.P., 2005, *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelak-sanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri*, *Jurnal Dinamika Pembangunan*, Vol. 2 No 1, Edisi Juli 2005, hal 9-18.
- Santoso, H., 2002, *Analisis Kebijakan Otonomi Daerah dan Kinerja Pembangunan Daerah: Kasus Provinsi Kali-mantan Barat* (Tesis S-2), Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sjafii, A., 2009, *Pengaruh Investasi Fisik dan Investasi Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 1990-2004*, *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol. 3 Nomor 1, Edisi Mei 2009, hal 59-76.
- Soebagiyo, D., 2000, *Disparitas Pembangunan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya: Studi Kasus di Daerah Sumbagsel*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, Edisi Juni 2000, hal 21-34.
- Solihin, D., 2008, *Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Wiayah Kawasan Timur Indonesia (KTI)* (Materi Disampaikan pada Konsultasi Regional PDRB 9 Juli 2008), Bappenas, Manado.
- Sumarsono, H., Utomo, S.H., 2009, *Deliberate Inflation pada Kebijakan Desentralisasi Fiskal Jawa Timur dan Dampak-nya Bagi Pertumbuhan Daerah*, *Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan*, Vol. 1 Nomor 3, Edisi 2009, hal 157-168.
- Syahrudin, 2006, *Desentralisasi Fiskal: Perlu Penyempurnaan Kebijakan dan Implementasi yang Konsisten*, Universitas Andalas, Padang,.
- Tan, S., 2012, *Perencanaan Pembangunan (Teori dan Implementasi pada Pembangunan Daerah)*, Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, Jambi.
- Tarigan, R., 2012, *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta, hal 79-97.
- Yuliarmi, NN. 2008. Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Inflasi Dalam Negeri Terhadap Nilai Impor Migas Indonesia Periode 1993-2005. <http://www.google.com>. Diakses tanggal 11 september 2008.